

Determinan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alfath Rizanda Putra, Suharto*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 933130104@uui.ac.id

JEL Classification Code:

E01, I30, I38

Kata kunci:

Kemiskinan; pendidikan; PDRB;
UMK

Email penulis:

alfathrizandhaputra@gmail.com
933130104@uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol2.iss2.art4

Abstract

Purpose – This research aims to analyze the determining variables (education, GRDP and UMK) of Regency/City Poverty in Yogyakarta

Methods – This research uses panel data analysis techniques, which combine a combination of time series data with cross section data.

Findings – The results of the research prove that GDP and GRDP have a negative effect on poverty in D.I. Yogyakarta, while MSEs have no effect on poverty dynamics in Yogyakarta

Implication – The policy implications of this research are that the government needs to make efforts to increase economic growth, education levels, and increase employment opportunities in Yogyakarta so that the poverty level decreases.

Originality – This research contributes to analyzing the determinants of analyzing the determining variables of Regency/City Poverty in D.I. Yogyakarta using panel data analysis.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel penentu (pendidikan, PDRB dan UMK) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Metode – Penelitian pada kali ini menggunakan teknik analisis data panel, dimana menggabungkan kombinasi antara data time series dengan data cross section.

Temuan – Hasil penelitian membuktikan bahwa dan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta, sementara UMK tidak berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di D.I. Yogyakarta

Implikasi – Implikasi kebijakan dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, serta memperbanyak kesempatan kerja di Yogyakarta agar tingkat kemiskinan menurun.

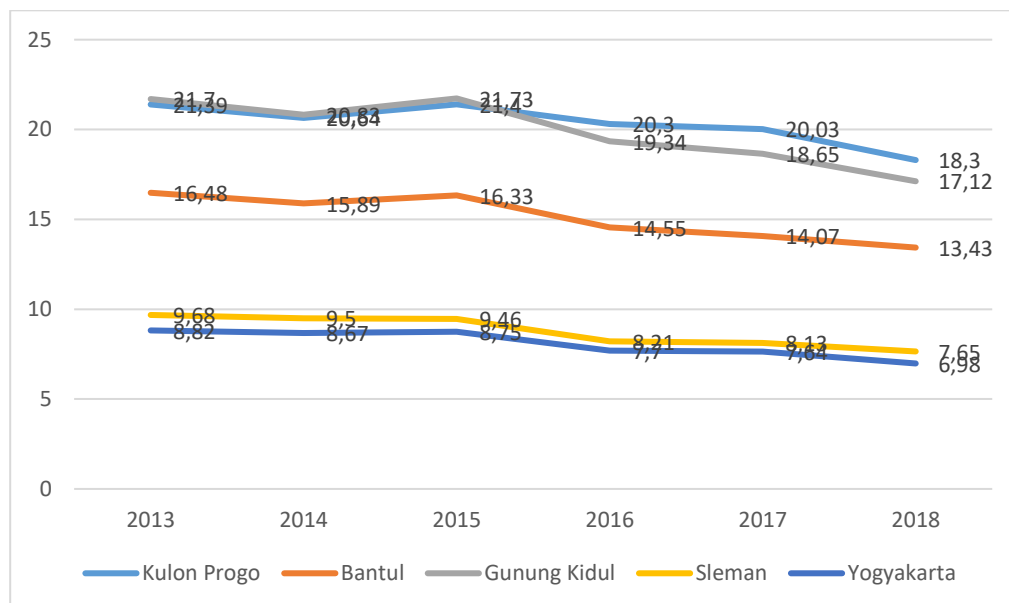
Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis determinan menganalisis variabel-variabel penentu terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dengan menggunakan analisis data panel.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok rumah tangga secara ekonomi untuk memenuhi taraf hidup rata-rata masyarakat (Waluyo, 2013). Permasalahan kemiskinan dilihat dari segi ekonomi disebabkan oleh tiga faktor yaitu: pertama, dilihat secara mikro

kemiskinan muncul karena terdapat perbedaan alokasi kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul dikarenakan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya hanya mendapatkan upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berkembang dimana angka kemiskinannya masih relatif tinggi. Menurut data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang angka kemiskinannya berada di atas angka nasional. Terdapat 5 provinsi yang berada pada angka kemiskinan terbesar, yaitu terletak pada kawasan timur Indonesia. Provinsi tersebut adalah Papua dengan angka kemiskinan 27,53 persen, Papua Barat dengan angka 22,17 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 21,09 persen, Maluku sebesar 17,69 persen dan Gorontalo sebesar 15,52 persen. Untuk Pulau Jawa, provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional terdapat di Provinsi Jawa Timur pada peringkat ke-16 dengan angka kemiskinan 10,37 persen. Disusul oleh Provinsi Jawa Tengah pada peringkat ke-15 dengan angka kemiskinan 10,8 persen. Provinsi D.I. Yogyakarta memperoleh peringkat tertinggi, yaitu pada pada posisi ke-12 yaitu dengan angka kemiskinan sebesar 11,7 persen. Sangat disayangkan dengan tingginya perolehan angka kemiskinan di Pulau Jawa, mengingat lengkapnya fasilitas infrastruktur dan minimnya ketimpangan yang sudah tersedia di Pulau Jawa. Terlebih lagi Provinsi D.I. Yogyakarta sangat dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, namun pada faktanya justru memperoleh peringkat tertinggi angka kemiskinan di Pulau Jawa.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2013-2018

Modal manusia (*human capital*) diduga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Salah satu bentuk investasi modal manusia adalah sistem pendidikan yang efektif serta tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung mendapatkan kehidupan yang sejahtera karena memiliki modal untuk berproduktifitas yang berkualitas. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Dilihat berdasarkan pengertiannya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output total, yaitu produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana kemakmuran masyarakat, karena dilihat berdasarkan pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara. Selain

dilihat dari pertumbuhan ekonomi, upah yang diterima para pekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tujuan diberikannya upah adalah untuk memicu para tenaga kerja yang memiliki potensi untuk masuk dalam perusahaan. Beberapa penelitian yang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Riasati (2018) menganalisis hubungan antara pendidikan, pengangguran terbuka, PDRB dan inflasi terhadap kemiskinan. Dengan menggunakan data panel, kajian tersebut menemukan bahwa PDRB dan inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Yogyakarta, sementara itu pendidikan dan pengangguran tidak berkontribusi pada tingkat kemiskinan. Penelitian lain dilakukan oleh Yusri (2018) meneliti Hasil penelitiannya menunjukkan variabel pendidikan, tingkat kesehatan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Ghatama (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara tingkat pengangguran, IPM, UMK dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menggunakan data panel dan hasil penelitiannya menemukan bahwa IPM dan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu variabel UMK dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Dari penelitian tersebut terdapat dua variabel yang signifikan yaitu jumlah penduduk dan IPM, maka setiap ada peningkatan jumlah penduduk dan IPM dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dari beberapa kajian tersebut menunjukkan bahwa studi tentang kemiskinan perlu dilakukan. Mengingat setiap provinsi memiliki karakteristik yang tidak sama maka variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan akan berbeda setiap wilayah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel, dimana menggabungkan kombinasi antara data time series dengan data cross section. Objek penelitian ini terdapat pada masyarakat yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan data time series dalam kurun waktu 2013-2018 dan data cross section yang meliputi 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu: Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable kemiskinan dengan menggunakan data persentase penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta dimana data tersebut dinyatakan dalam satuan persen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten. Pada variabel pendidikan diproses oleh rata-rata lama sekolah pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dinyatakan dalam satuan tahun. Pada variabel PDRB, dengan mengambil data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Pada variabel Upah Minimum Kabupaten dinyatakan dalam satuan rupiah. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPendidikan}_{it} + \beta_2 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_3 \text{LogUMK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Kemiskinan_{it}$ = Persentase Kemiskinan Regional (Persen)

$\text{LogPendidikan}_{it}$ = Log Pendidikan Regional

LogPDRB_{it} = Log PDRB atas dasar harga konstan

LogUMK_{it} = Log Upah Minimum Kabupaten

i = Banyaknya observasi (5 Kab/Kota di DIY)

t = Banyaknya waktu (Periode 2013-2018)

ε = Error term

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel (*pooled data*) yaitu gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Pada data data panel terdiri

dari beberapa model pendekatan atau model yang antara lain adalah *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Peneliti menggunakan data time series pada kurun waktu 2013-2018. Sedangkan data cross section ada sebanyak 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji pemilihan model melalui uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model *random effect* adalah yang model yang terbaik. Hasil model *random effect* terlihat pada table 1.

Tabel 1. Hasil Regresi *Random Effect Model*

| Variabel | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 156.2607 | 13.31791 | 11.73312 | 0.0000 |
| <i>LogPendidikan_{it}</i> | -13.70271 | 2.955948 | -4.635641 | 0.0001 |
| <i>LogPDRB_{it}</i> | -5.779055 | 1.119737 | -5.161083 | 0.0000 |
| <i>LogUMK_{it}</i> | -1.149958 | 0.881430 | -1.304650 | 0.2034 |
| R-Squared | 0.906485 | | | |
| Prob. F-Statistic | 0.000 | | | |

Sumber: Data diolah

Dari table diatas diketahui bahwa nilai R square menunjukkan nilai sebesar 0.906485, hal ini dapat disimpulkan bahwa 90.65 persen variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan, PDRB, dan UMK. Sedangkan yang sisanya sebesar 9.35 persen, akan dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Sementara dari uji F didapatkan nilai probabilitas F sebesar 0.000000 yang artinya lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan, PDRB, dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengujian selanjutnya yaitu uji statistik t untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini menunjukkan signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasilnya bisa dilihat dalam kolom probabilitas dari tabel 1 (hasil analisis regresi). Hasil pengujian diperoleh variabel pendidikan menunjukkan probabilitas sebesar 0.0001 lebih kecil dari α (0.05) dengan koefisien sebesar -13.70271. Secara statistik pendidikan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013-2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kesimpulannya adalah setiap adanya peningkatan pendidikan sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan kemiskinan sebesar 13.7 persen. Hasil ini dinyatakan sesuai dengan hipotesis penelitian. Variabel PDRB menunjukkan probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari α (0.05) dengan koefisien sebesar -5.779055. Secara statistik PDRB di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013-2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kesimpulannya adalah setiap adanya peningkatan PDRB sebesar 1 persen, dapat menurunkan kemiskinan sebesar 5.78 persen. Hasil ini dinyatakan sesuai dengan hipotesis penelitian. Sementara itu variabel upah minimum kabupaten menunjukkan probabilitas sebesar 0.2034 lebih besar dari α (0.05) dengan koefisien sebesar -1.149957. Maka secara statistik UMK di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013-2018 tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Untuk mengetahui daerah mana yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi maka dilakukan uji intersept. Dalam hal ini Kabupaten Bantul menunjukkan angka tertinggi, dan Kota Yogyakarta terendah.

Tabel 2. Hasil Analisis Intersept

| Kabupaten/Kota | Crossid | Koefisien | Intersept |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Yogyakarta | -0.580651 | 154.4321 | 153.851449 |
| Kulonprogo | 0.016558 | 154.4321 | 154.448658 |
| Bantul | 0.954212 | 154.4321 | 155.386312 |
| Gunungkidul | -0.459132 | 154.4321 | 153.972968 |
| Sleman | 0.069013 | 154.4321 | 154.501113 |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang diproksikan oleh rata-rata lama sekolah diketahui berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2016. Hal membuktikan bahwa tingginya pendidikan dapat menghindarkan penduduk dari permasalahan kemiskinan. Pendidikan merupakan modal awal seseorang untuk memperoleh kesejahteraan. Menurut Simmons (dalam Todaro, 2004) apabila disuatu wilayah atau negara ingin menyelamatkan diri dari wabah kemiskinan, maka solusinya dengan cara meningkatkan tingkat pendidikannya. Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) yang berjudul Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara, yang menyebutkan bahwa variabel Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha diketahui berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2016. Hal ini membuktikan bahwa PDRB dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dengan tingginya angka PDRB pada suatu wilayah, maka dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah tersebut. Menurut Kuznets (dalam Todaro, 2004) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi (2015) yang berjudul Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten diketahui tidak berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2016. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya tingkat upah yang ditawarkan, tidak serta merta membuat seseorang terhindar dari permasalahan kemiskinan. Keadaan tersebut disebabkan karena mayoritas angkatan kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta bekerja pada sektor informal. Dengan adanya kenaikan upah minimum tidak akan memberikan dampak kesejahteraan bagi pekerja informal, karena perlu diketahui bahwa sektor informal belum secara resmi mendapat izin dan terdaftar pada kantor pemerintahan. Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nur (2017) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, yang menyebutkan bahwa variabel UMK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kesimpulan dan Implikasi

Pendidikan berpengaruh dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil tersebut dinyatakan sesuai dengan hipotesis. Hasil sesuai hipotesis. Sementara Upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Dengan hasil ini, upaya peningkatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Yogyakarta. Sementara peningkatan UMK belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Adi, Priyo. (2015). Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta. Skripsi sarjana (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amalia, Alfi. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No.3. 324 – 344
- Ghatama. Moch Aldino Putra. (2018). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. Skripsi Sarjana

- (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Nur, Alifah. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Riasati, Safira Aini Nur. (2018). Analisis Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2009-2015. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Todaro. Smith. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, D.E. (2013). Pendekatan Struktural, Ekonomi dan Spasial Sebagai Model Alternatif Penanggulangan Kemiskinan. *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4.
- Yusri, Cindy Aftasia. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.